



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RENCANA AKSI TA. 2025



**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang memberikan nilai guna serta mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya.

Penyusunan Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan penyediaan perumahan. Lebih dari itu, rencana aksi ini disusun sebagai pedoman strategis yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terarah, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan kebutuhan serta pemanfaatan sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya manusia, pendanaan, maupun sarana dan prasarana, guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan perumahan secara efektif, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan selama Tahun 2025

Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 ini tidak terlepas dari

Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025–2029 dan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025. Oleh karena itu, diharapkan dalam pelaksanaannya rencana aksi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kinerja aparatur secara berkelanjutan.

Pontianak, Agustus 2025
Kepala Satuan Kerja Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Barat



Michael Robert, S.T.
NIP. 197206082006041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR SATUAN KERJA.....	2
C. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI.....	5
BAB 2 PENETAPAN KINERJA.....	9
BAB 3 PENUTUP	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Barat	4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi dan Profil Pegawai Satuan Kerja PKP Provinsi Kalbar	
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Sekretariat Jenderal	9
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Revisi-01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Sekretariat Jenderal	10
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	11
Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Revisi-01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	11
Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	12
Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Revisi-01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	13
Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja Revisi-02 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	13
Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja Revisi-03 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	14
Gambar 2.9 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	15
Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja Revisi-01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	15
Gambar 2.11 Perjanjian Kinerja Revisi-02 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	16

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Capaian Kinerja Kegiatan Bulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.....	17
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Kegiatan Triwulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.....	18

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan, serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks global, keterjangkauan perumahan telah menjadi isu krusial yang mencapai tingkat krisis seiring dengan pesatnya laju urbanisasi. Secara global, sekitar 1,6 hingga 3 miliar penduduk dunia terdampak oleh permasalahan keterjangkauan perumahan. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa sekitar 1,12 miliar orang masih tinggal di kawasan kumuh atau permukiman informal yang ditandai oleh kepadatan hunian tinggi, risiko tunawisma, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Sejalan dengan kondisi global tersebut, permasalahan keterjangkauan perumahan juga masih menjadi isu strategis di tingkat nasional. Berdasarkan data kepemilikan hunian, masih terdapat sekitar 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah, sementara dari sisi kualitas hunian terdapat sekitar 26,9 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.

Permasalahan keterjangkauan dan kelayakan perumahan tersebut sejalan dengan komitmen global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, khususnya Tujuan 11 yaitu “Sustainable Cities and Communities” yang menargetkan terwujudnya kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Salah satu indikator utama dalam tujuan tersebut adalah terpenuhinya akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau (adequate, safe, and affordable housing) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan

berpenghasilan rendah. Pencapaian target ini menuntut sinergi kebijakan lintas sektor, perencanaan yang terintegrasi, serta pelaksanaan program perumahan yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemerataan manfaat pembangunan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan pembentukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan 1 yang selanjutnya disingkat BP3KP Kalimantan 1, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. BP3KP merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis bidang operasional di penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. BP3KP dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan memiliki wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung dan melaksanakan amanat pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta sebagai bentuk akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat menyusun Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2025 yang memuat target bulanan yang harus dipenuhi guna mencapai target kinerja tahun berjalan.

B. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR SATUAN KERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis bidang operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Sementara itu, Satuan Kerja, yang

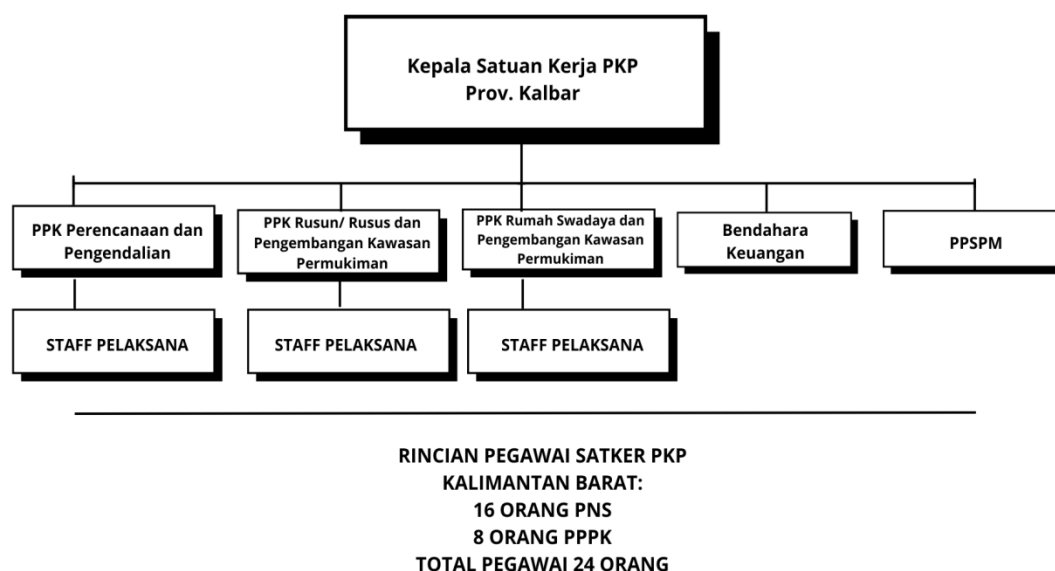
selanjutnya disebut Satker, merupakan unit organisasi lini kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran serta melaksanakan kegiatan Bantuan Pengembangan Permukiman.

Sejalan dengan peran dan kedudukan tersebut, Tugas Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari tugas yang telah ditetapkan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I, yaitu melaksanakan pembangunan Rumah Susun, pembangunan Rumah Khusus, peningkatan kualitas Rumah Swadaya melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemberian bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mendukung penyelenggaraan sebagian fungsi yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I, yaitu:

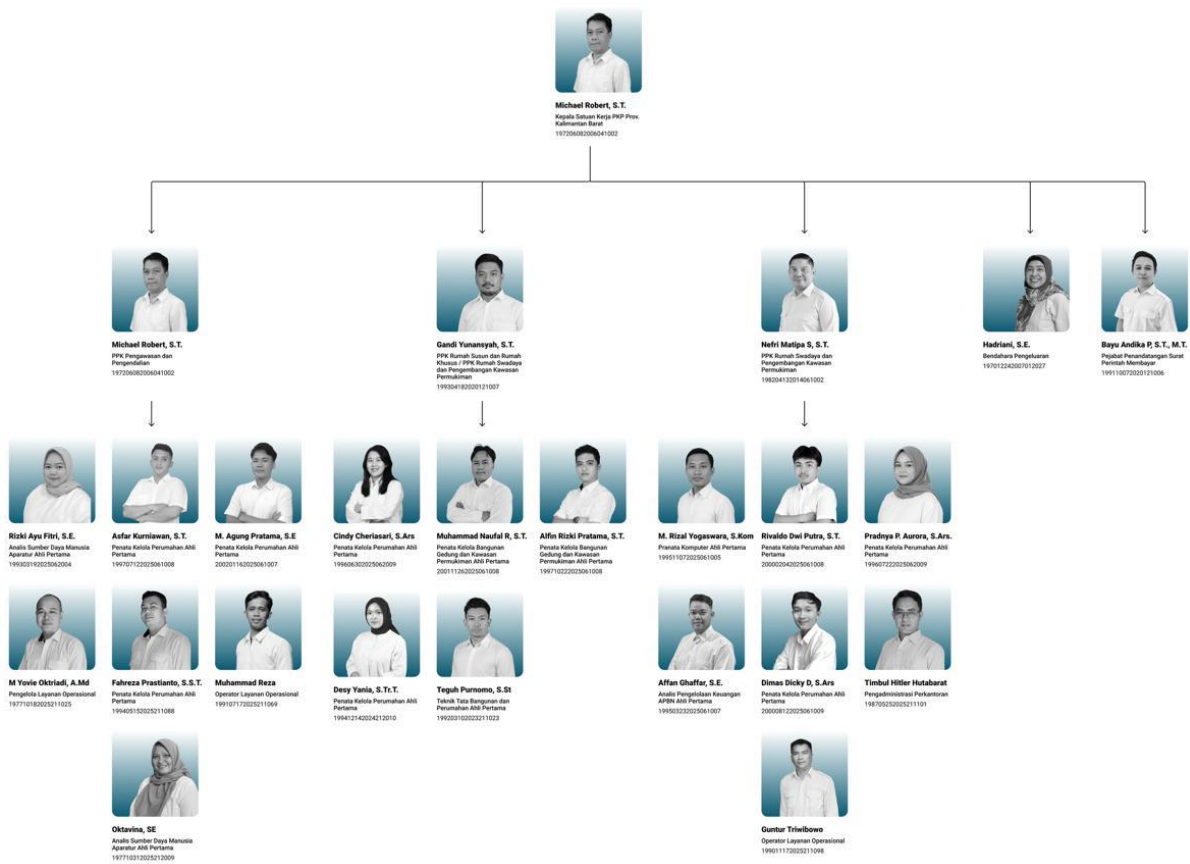
- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- k. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

- l. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian antikorupsi dan penyuapan; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum Satker.

Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berada dibawah kewenangan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I yang dipimpin oleh Bapak Ir. Arifay Saini, S.T., M.Eng. Secara struktur internal, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 1.2 Struktur Organisasi dan Profil Pegawai Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Barat

C. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya dalam peningkatan akses terhadap hunian layak, berkelanjutan, dan berketahanan, masih dihadapkan pada sejumlah isu dan permasalahan strategis. Isu-isu tersebut mencakup berbagai aspek sebagaimana diuraikan pada poin-poin berikut:

1. Tingginya Backlog Kepemilikan dan Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan data backlog perumahan di Provinsi Kalimantan Barat, tercatat sebanyak 1.767.189 keluarga, dengan backlog kepemilikan rumah sebesar 8,06 persen atau sebanyak 142,399 KK, backlog rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 23,23 persen atau sebanyak 410,538 KK, sehingga secara keseluruhan total backlog perumahan mencapai 31,29 persen atau sebanyak 552.937 KK. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat proporsi yang signifikan dari rumah tangga yang belum memiliki rumah serta masih menempati hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan masyarakat terhadap perumahan yang layak dengan ketersediaan rumah yang dapat diakses secara memadai, baik dari aspek jumlah, kualitas, maupun keterjangkauan. Oleh karena itu, situasi ini memerlukan intervensi kebijakan yang terarah serta pelaksanaan program perumahan yang berkelanjutan dan terintegrasi, guna menurunkan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat

2. Keterbatasan Daya Beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Keterbatasan kemampuan ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan salah satu hambatan utama dalam memperoleh akses kepemilikan rumah, karena sebagian besar MBR tidak memiliki daya beli yang cukup untuk membayar biaya pembelian atau cicilan rumah secara langsung, sehingga banyak dari mereka yang terhambat dalam proses kepemilikan rumah sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya penghasilan kelompok MBR yang seringkali tidak mampu memenuhi kriteria pembiayaan perumahan formal, ditambah dengan akses terhadap lembaga keuangan yang masih terbatas dan kurangnya skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

3. Kualitas Permukiman dan Penanganan Kumuh.

Kualitas permukiman masih menjadi tantangan dalam pembangunan perumahan, terutama di kawasan padat penduduk yang berkembang secara tidak terencana dan memiliki keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi tersebut ditandai oleh rumah tidak layak huni, akses air bersih dan sanitasi yang terbatas, serta buruknya pengelolaan lingkungan, yang memicu munculnya kawasan kumuh dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kawasan kumuh perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas fisik permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan

masyarakat guna mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.

4. Dinamika Urbanisasi dan Kompleksitas Pembangunan Perkotaan

Percepatan arus urbanisasi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong terjadinya konsentrasi penduduk secara signifikan di kota-kota besar. Kondisi ini menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap kapasitas perkotaan, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak, akses air bersih, layanan sanitasi yang memadai. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan ketersediaan infrastruktur perkotaan berpotensi memicu berbagai permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi apabila tidak dikelola secara terencana dan berkelanjutan.

5. Pengelolaan Hunian Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Pengelolaan hunian berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta tekanan terhadap sumber daya alam. Konsep ini menekankan pada perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan hunian yang memperhatikan efisiensi penggunaan lahan, energi, dan air, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan prinsip bangunan hijau, pengelolaan limbah yang terpadu, pemanfaatan energi terbarukan, serta penyediaan ruang terbuka hijau merupakan bagian integral dalam mewujudkan lingkungan hunian yang sehat dan berdaya dukung tinggi. Selain itu, pengelolaan hunian yang berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan, sehingga kawasan permukiman tidak hanya layak huni pada saat ini, tetapi juga tetap terjaga bagi generasi mendatang.

6. Inovasi dan Integrasi Digital dalam Penyelenggaraan Perumahan

Inovasi dan integrasi digital dalam penyelenggaraan perumahan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan perumahan. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital mendukung pengelolaan data yang terintegrasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, digitalisasi memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan meningkatkan

kualitas pelayanan publik agar program perumahan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

7. Penguatan Ketangguhan Permukiman terhadap Risiko Bencana

Penguatan ketangguhan permukiman terhadap risiko bencana menjadi penting dalam pembangunan perumahan, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi seperti banjir, kebakaran, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Upaya ini dilakukan melalui perencanaan berbasis risiko, penerapan standar bangunan yang aman, serta penyediaan infrastruktur yang tangguh. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan, mengurangi dampak bencana, dan mendukung keberlanjutan permukiman.

BAB II

PENETAPAN KINERJA

Indikator Kinerja Program pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) awal yang disepakati antara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I dengan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Perjanjian Kinerja tersebut bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian atau revisi sesuai dengan perkembangan serta ketersediaan anggaran pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan masing-masing Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

1. DIPA Sekretariat Jenderal

Untuk DIPA Sekretariat Jenderal pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, jumlah PAGU APBN pada Perjanjian Kinerja Awal adalah sebesar Rp. 455.119.000,00. Kemudian, dilakukan revisi dalam Perjanjian Kinerja Revisi-01 sehingga jumlah PAGU APBN berubah menjadi Rp. 617.919.000,00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Michael Robert**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Baiqi**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 01 Agustus 2025

Pihak Kedua
Arifay Baiqi
NIP. 19730827 200312 1 005

Pihak Pertama
Michael Robert
NIP. 19720608 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SARANAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1. Tagihan Laporan Dukungan Manajemen	1 laporan

KEGIATAN
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

PAGU APBN
Rp. 455.119.000,00

Pontianak, 01 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
Arifay Baiqi

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Michael Robert

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Sekretariat Jenderal

REVISI-01

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Michael Robert**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksanaan Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 17 November 2025

Pihak Kedua **Pihak Pertama**
Arifay Saini *Michael Robert*
NIP. 19730827 200312 1 005 NIP. 19720608 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BALAI PELAKSANA PENYELIDIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya disamping manajemen Sekretariat (Jenderal)	Target Laporan Disamping Manajemen	1 Laporan

KESIMPULAN Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat **PAGU APBN** Rp 617.019.000,00

Pontianak, 17 November 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYELIDIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I **KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Arifay Saini *Michael Robert*
ARIFAY SAINI **MICHAEL ROBERT**

Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja Revisi-01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Sekretariat Jenderal

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Untuk DIPA Kawasan Permukiman, jumlah PAGU APBN pada Perjanjian Kinerja Awal adalah sebesar Rp. 41.516.770.000,00. Kemudian dilakukan revisi dalam Perjanjian Kinerja Revisi-01 menjadi sejumlah Rp. 41.151.876.000,00.

Selain itu, terdapat perubahan Target Indikator Kinerja pada poin Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman yang sebelumnya adalah 1.282 unit, menjadi 1.279 unit. Adapun target untuk indikator lainnya, yaitu Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan tetap sebanyak 1 laporan dan Penanganan Permukiman Kumuh tetap seluas 19,92 Hektar.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Michael Robert**
Jabatan : **Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saifi**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 29 Agustus 2025

Pihak Kedua

Arifay Saifi
Arifay Saifi
NIP. 19730827 200312 1 005

Pihak Pertama

Michael Robert
Michael Robert
NIP. 19720608 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BALAI PELAKSANA PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	BAHASA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya terwujudnya rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Laporan Perumahan, Tanah, dan Pelayanan Perumahan Rumah, Perumahan Kualitas dan Perumahan Rumah 2. Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1. Laporan 2. 1282 Unit
2	Meningkatnya luas permukiman rumah yang dibangun secara terpadu	1. Jumlah Perumahan Permukiman Rumah	19,52 Hektar

KEGIATAN
1. **Perumahan dan Kawasan Permukiman Prioritas Kalimantan Barat**

PADN APBN
Rp. 41,316,770,000.00

Pontianak, 29 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

Arifay Saifi
ARIFAY SAIFI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Michael Robert
MICHAEL ROBERT

Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

REVISI-01

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Michael Robert**
Jabatan : **Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saifi**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua

Arifay Saifi
Arifay Saifi
NIP. 19730827 200312 1 005

Pihak Pertama

Michael Robert
Michael Robert
NIP. 19720608 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BALAI PELAKSANA PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	BAHASA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya terwujudnya rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Laporan Perumahan, Tanah, dan Pelayanan Perumahan Rumah, Perumahan Kualitas dan Perumahan Rumah 2. Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1. Laporan 2. 1279 Unit
2	Meningkatnya luas permukiman rumah yang dibangun secara terpadu	1. Jumlah Perumahan Permukiman Rumah	19,52 Hektar

KEGIATAN
1. **Perumahan dan Kawasan Permukiman Prioritas Kalimantan Barat**

PADN APBN
Rp. 41,151,876,000.00

Pontianak, 31 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

Arifay Saifi
ARIFAY SAIFI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Michael Robert
MICHAEL ROBERT

Gambar 2. 4 Perjanjian Kinerja Revisi-01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Untuk DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, jumlah PAGU APBN pada Perjanjian Kinerja Awal adalah sebesar Rp105.520.000,00. Kemudian

dilakukan Revisi-01 pada 11 Agustus 2025 dengan kenaikan PAGU menjadi Rp527.499.000,00. Selanjutnya, pada Revisi-02 tanggal 26 Agustus 2025, terjadi peningkatan PAGU menjadi Rp5.783.248.000,00, dan terakhir dilakukan Revisi-03 pada 31 Oktober 2025 sehingga jumlah PAGU APBN menjadi Rp5.803.449.000,00.

Selain perubahan anggaran, terdapat perubahan pada Target Indikator Kinerja khususnya untuk Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan. Pada dokumen awal dan Revisi-01, target ditetapkan sebanyak 1 unit. Target ini kemudian meningkat pada Revisi-02 menjadi 241 unit dan kembali mengalami penyesuaian pada Revisi-03 menjadi 242 unit. Sementara itu, target untuk Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan tetap konsisten sebanyak 1 laporan di setiap tahapan revisi.

REVISI-01

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Michael Robert**
Jabatan : **Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Artay Satri**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selaras dengan visi dan misi pemerintah provinsi Kalimantan Barat.
- Pihak Kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan progress ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 11 Agustus 2025.

Pihak Kedua

Artay Satri

Artay Satri
NIP. 19730827 200312 1 005

Pihak Pertama

Michael Robert

Michael Robert
NIP. 19720608 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BALAI PELAKSANA PENYELANGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kinerja Kerja, Kualitas, Penanganan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Rumah Layak Huni melalui Pengawasan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	2. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1 Unit

KEGIATAN

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	PAGU APBN	Rp. 527.499.000,00
---	------------------	--------------------

Pontianak, 11 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYELANGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

Artay Satri

ARTAY SATRI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Michael Robert

MICHAEL ROBERT

Gambar 2. 5 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Michael Robert**
Jabatan : **Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Rinali**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksanaan Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan menyukseskan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 01 Agustus 2025

Pihak Pertama
Arifay Rinali
NIP. 19730827 200312 1 005

Pihak Kedua
Michael Robert
NIP. 19720508 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BALAI PELAKSANA PENYELIDIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Komitmen, Penguasaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan
2	Meningkatnya Penyelidikan Rumah Layak Huni melalui Penguasaan Kondisi Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	2. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1 Unit

KEGIATAN
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
Rp 105,320,000.00

Pontianak, 01 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYELIDIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
Arifay Rinali

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Michael Robert

Gambar 2. 6 Perjanjian Kinerja Revisi-01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

REVISI-02

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Michael Robert**
Jabatan : **Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Rinali**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksanaan Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

5. Pihak Pertama berjanji akan menyukseskan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
6. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua
Arifay Rinali
NIP. 19730827 200312 1 005

Pihak Pertama
Michael Robert
NIP. 19720508 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BALAI PELAKSANA PENYELIDIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Komitmen, Penguasaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan
2	Meningkatnya Penyelidikan Rumah Layak Huni melalui Penguasaan Kondisi Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	2. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	241 Unit

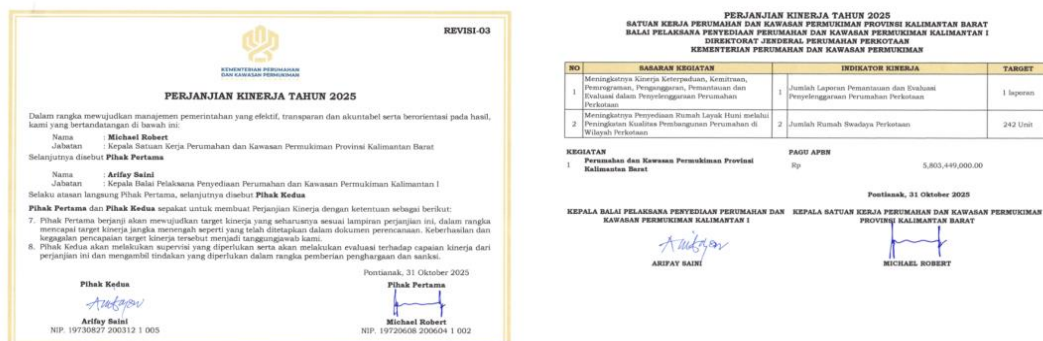
KEGIATAN
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
Rp 5,783,248,000.00

Pontianak, 26 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYELIDIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
Arifay Rinali

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Michael Robert

Gambar 2. 7 Perjanjian Kinerja Revisi-02 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



Gambar 2. 8 Perjanjian Kinerja Revisi-03 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Untuk DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, jumlah PAGU APBN pada Perjanjian Kinerja Awal adalah sebesar Rp 8.444.525.000,00. Kemudian dilakukan Revisi-01 pada 22 Agustus 2025 dengan kenaikan PAGU yang menjadi sebesar Rp42.197.008,000,00. Selanjutnya, pada Revisi-02 tertanggal 27 Oktober 2025, jumlah PAGU APBN mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 40.142.318.000,00.

Selain itu, terdapat perubahan pada Target Indikator Kinerja untuk Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan. Pada dokumen awal, indikator tersebut belum tercantum dalam sasaran kegiatan, namun pada dokumen Revisi-01 target ditetapkan sebanyak 1.578 unit. Target ini kemudian mengalami sedikit penyesuaian pada Revisi-02 menjadi sebanyak 1.575 unit. Terdapat pula penambahan indikator pada Revisi-02 yaitu Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan dengan target sebanyak 1 laporan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Michael Robert**
Jabatan : **Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**
Selaku asasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 01 Agustus 2025

Pihak Kedua


Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

Pihak Pertama


Michael Robert
NIP. 19720608 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di pedesaan	1. Jumlah Rumah Baku Asetika Pendidikan Kringmanan	1 unit
2	Meningkatnya kinerja keterpadatan, kendiran, pemukiman, pengangkutan, pemukiman dan evaluasi dalam pembangunan perumahan pedesaan	2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Pedesaan	1 laporan

KEGIATAN
1. **Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

PAJAK APBN
Rp. 8.444.525.000,00

Pontianak, 01 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I


ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT


MICHAEL ROBERT

Gambar 2. 9 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

REVISI-01

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Michael Robert**
Jabatan : **Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**
Selaku asasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 22 Agustus 2025

Pihak Kedua


Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

Pihak Pertama


Michael Robert
NIP. 19720608 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di pedesaan	1. Jumlah Rumah Baku Asetika Pendidikan Kringmanan	1 unit
2	Meningkatnya kinerja keterpadatan, kendiran, pemukiman, pengangkutan, pemukiman dan evaluasi dalam pembangunan perumahan pedesaan	2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Pedesaan	1 laporan
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni modal pemerintah kualitas pembangunan perumahan di wilayah pedesaan	3. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Pedesaan	1578 unit

KEGIATAN
1. **Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

PAJAK APBN
Rp. 42.197.008.000,00

Pontianak, 22 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I


ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT


MICHAEL ROBERT

Gambar 2. 10 Perjanjian Kinerja Revisi-01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEBERTERANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah	Jumlah Rumah Sederajat Asasana Pendidikan Kecamatan	1 unit
2	Meningkatnya kinerja terpadu, terintegrasi, terkoordinasi, terencana dan efektif dalam pelayanan perumahan penduduk	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 laporan
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 laporan
4		Jumlah Rumah Sederajat Perumahan Perdesaan	1375 unit

KEGIATAN
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

PASIF APIS
Rp 40,142,318,000.00

Pontianak, 27 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
Arifay Saini
ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Michael Robert
MICHAEL ROBERT

Gambar 2. 11 Perjanjian Kinerja Revisi-02 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Berdasarkan Perjanjian Kerja tersebut kemudian Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat menyusun tabel target capaian kinerja kegiatan triwulan. Tabel target capaian kinerja ini disusun sebagai alat pengendali dan pemantauan pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan jadwal, target, dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja secara berkala dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun Target Kinerja Program pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal antara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Kalimantan Barat dirincikan dalam Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Target Capaian Kinerja Kegiatan Bulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)			
				TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
SEKRETARIAT JENDERAL							
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal						
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	1	10	30	70	100
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN							
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di Kawasan Permukiman						
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	10	30	70	100
2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	1279	10	30	70	100
SK-2	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu						
1	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	19,92	10	30	70	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN							
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	10	30	70	100
SK-2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	242	10	30	70	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN							
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan						
1	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Unit	1	10	30	70	100
SK-2	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	10	30	70	100
SK-3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	1	10	30	70	100
2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	1575	10	30	70	100

Tabel 2. 2 Target Indikator Kinerja Kegiatan Triwulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

INDIKATOR KINERJA	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)			
				TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
SEKRETARIAT JENDERAL							
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal						
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Melaksanakan layanan perkantoran	1 Layanan	10	30	70	100
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN							
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di Kawasan Permukiman						
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan	10	30	70	100
2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Menyelesaikan Program BSPS	1279 Unit	10	30	70	100
SK-2	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu						
1	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	Menyelesaikan program Penanganan Kawasan Kumuh	19,92 ha	10	30	70	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN							
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan	10	30	70	100
SK-2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Menyelesaikan Program BSPS	242 Unit	10	30	70	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN							
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan						
1	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Menyelesaikan Pembangunan Rusun	1 Unit	10	30	70	100
SK-2	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan						

1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan	10	30	70	100
SK-3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan	10	30	70	100
2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Menyelesaikan Program BSPS	1575 Unit	10	30	70	100

BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat disusun sebagai dokumen pendukung pelaksanaan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I Tahun 2025–2029, serta Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029. Dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman dan arahan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam mengimplementasikan visi, misi, serta sasaran strategis yang harus dicapai oleh BP3KP Kalimantan I secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis tersebut, diperlukan upaya yang terkoordinasi melalui penguatan konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia sehingga kinerja pembangunan perumahan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029 yang konsisten, didukung oleh keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan mampu mempercepat penyediaan rumah layak huni serta meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan integrasi, baik secara vertikal maupun horizontal, menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan rakyat. Rencana Aksi ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kebijakan penyelenggaraan program, dengan tetap memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penyediaan perumahan.

Penyusunan Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat melalui pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rencana Aksi ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan teknis, tetapi juga sebagai landasan operasional dalam memastikan keterpaduan program, peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta keberlanjutan hasil pembangunan perumahan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan pelaksanaan yang terarah, Rencana Aksi ini diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan pemerataan akses hunian layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**